



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 12383-12396

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Konservatisme Akuntansi, dan Kebijakan Dividen terhadap Agresivitas Pajak

Angela Aprilia, Andri Syaputra

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

[angelaaprilia7@gmail.com](mailto:angelaaprilia7@gmail.com), [dosen00987@unpam.ac.id](mailto:dosen00987@unpam.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh dewan komisaris independen, konservatisme akuntansi, dan kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Agresivitas pajak menjadi isu krusial karena praktik ini dapat menghambat optimalisasi penerimaan negara, di mana pajak memberikan kontribusi dominan sebesar 78,29% terhadap total pendapatan negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Teknik analisis data dilakukan melalui regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12, di mana hasil uji statistik menunjukkan bahwa Random Effect Model (REM) merupakan model yang paling tepat untuk digunakan. Hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) membuktikan bahwa dewan komisaris independen, konservatisme akuntansi, dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, secara parsial (Uji T), penelitian ini menemukan hasil yang beragam. Variabel dewan komisaris independen dan kebijakan dividen terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran komisaris independen sering kali hanya bersifat formalitas regulasi, sementara kebijakan dividen lebih diprioritaskan untuk menjaga reputasi perusahaan daripada strategi penghematan pajak. Sebaliknya, konservatisme akuntansi terbukti berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dapat membatasi ruang gerak manajemen untuk melakukan manipulasi laba, sehingga secara efektif mampu menekan tindakan agresivitas pajak perusahaan.*

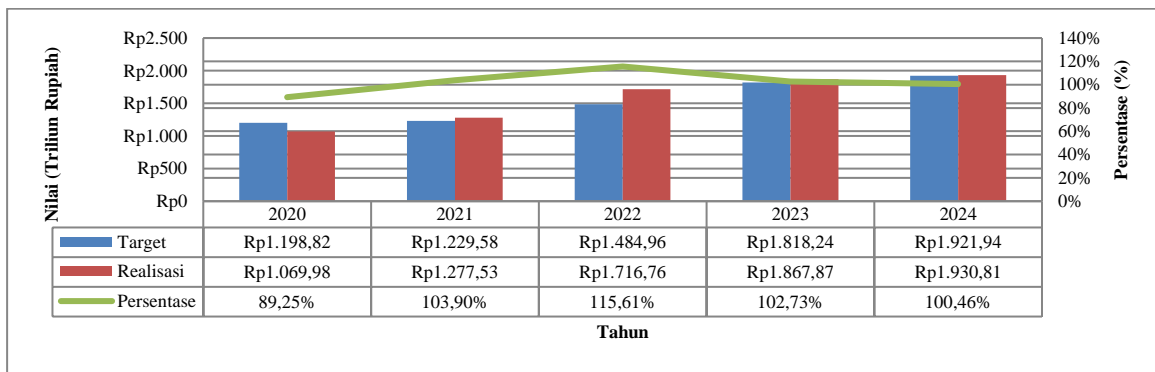
*Kata kunci: Agresivitas Pajak, Dewan Komisaris Independen, Konservatisme Akuntansi, Kebijakan Dividen, Sektor Energi.*

### 1. Latar Belakang

Penerimaan negara merupakan total pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari berbagai sumber untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan. Tujuan dari penerimaan negara meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas, mendukung program-program pembangunan nasional, memperkuat ketahanan fiskal, dan menjaga keseimbangan anggaran agar pengeluaran pemerintah tidak melebihi pendapatan yang diterima. Pada tahun 2024, realisasi total penerimaan negara mencapai Rp2.850,61 triliun dan melampaui target APBN yang ditetapkan sebesar Rp2.802,46 triliun dengan mayoritas bersumber dari penerimaan perpajakan. Secara lebih rinci, 78,29% dari penerimaan negara berasal dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 20,50%, sementara penerimaan hibah hanya berkontribusi sebesar 1,21% ([djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id)).

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung berbagai kegiatan publik yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pajak juga menjadi beban bagi perusahaan, yang mendorong mereka untuk mencari cara mengurangi kewajiban pajak.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan tabel diatas, target dan realisasi penerimaan pajak selama periode 2020 - 2024 menunjukkan peningkatan yang relatif stabil, namun fluktuasi persentase capaian realisasi mengindikasikan adanya dinamika dalam efektivitas pengumpulan pajak. Meskipun secara umum realisasi pajak berhasil mendekati atau melampaui target pada beberapa tahun, penurunan realisasi pada 2023 menunjukkan bahwa penerimaan negara masih rentan terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan pengelolaan beban pajaknya. Kondisi ini menjadi isu agresivitas pajak sebagai faktor yang perlu diperhatikan, karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat mengurangi optimalisasi penerimaan negara dan memengaruhi pencapaian target fiskal pemerintah.

Agresivitas pajak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya demi keuntungan yang optimal. Agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak secara legal maupun ilegal untuk menurunkan laba kena pajak. Tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dianggap melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak dapat mencakup tindakan legal seperti *tax avoidance*, di mana perusahaan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, maupun tindakan ilegal seperti *tax evasion* yaitu penggelapan pajak. Biasanya perusahaan sebagai wajib pajak badan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang (UU) maupun peraturan perpajakan lainnya. Kelemahan tersebut juga biasa disebut *grey area*, yakni celah atau kelonggaran regulasi yang berada antara praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (Lienda dkk., 2023).

Kasus penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada salah satu perusahaan multinasional di sektor *energy* yaitu PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing*. Isu ini pertama kali muncul pada tahun 2009 dan sempat mencuri perhatian publik walaupun tuduhan tersebut tidak terbukti. Pada tahun 2019, isu ini muncul kembali karena diduga PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik *transfer pricing* karena mengalihkan pendapatan dan laba pada anak perusahaannya yang berlokasi di Singapura (Wahyuningtias dkk., 2025).

Skema transaksi yang terjadi pada PT Adaro Energy Tbk melibatkan penjualan batu bara di Singapura yang seharusnya bahan baku tersebut dibeli menggunakan harga jual Singapura untuk didistribusikan. Namun PT Adaro Energy Tbk memanipulasinya dengan membeli bahan bakunya dari Indonesia menggunakan harga jual Indonesia lalu mentransfernya ke anak perusahaan mereka di Singapura. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak menetapkan harga jual ini tidak wajar dan berpotensi mengurangi penerimaan negara (Wahyuningtias dkk., 2025).

PT Adaro Energy Tbk diduga telah memanfaatkan praktik transfer pricing untuk mengalihkan pendapatan dan laba ke anak perusahaannya di Singapura karena tarif pajak yang ditetapkan di Singapura lebih rendah dari Indonesia sebesar 17%. Semakin kecil pendapatan yang diakui oleh PT Adaro Energy Tbk, semakin sedikit juga pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Atas isu ini, PT Adaro Energy Tbk diduga harus membayar pajak sebesar US\$ 125 juta (Wahyuningtias dkk., 2025).

Penghindaran pajak ini memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, yang menilai bahwa tindakan tersebut merugikan pendapatan negara dan menghambat kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik. Selain itu, isu ini menyoroti tantangan dalam pengawasan perpajakan terhadap perusahaan multinasional yang menggunakan struktur bisnis kompleks untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Sejak terungkapnya kasus ini, PT Adaro Energy Tbk telah menghadapi tekanan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik perpajakannya. Kasus ini juga mendorong diskusi lebih lanjut mengenai perlunya reformasi sistem perpajakan di Indonesia untuk menutup celah yang memungkinkan penghindaran pajak melalui teknik *transfer pricing*. Dalam konteks ini, kasus PT Adaro Energy menjadi contoh penting mengenai bagaimana perusahaan besar dapat memanfaatkan regulasi perpajakan dan dampaknya terhadap ekonomi negara.

Salah satu faktor perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah dewan komisaris independen. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Sedangkan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota dewan komisaris lainnya, maupun direksi. Mereka dipilih dari pihak luar untuk menjamin independensi pengawasan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah adil dan menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas dan publik (Halim, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bernhard & Veny (2024) dinyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan pula dengan penelitian Halim (2024) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Prastiwi (2021), Kamul & Riswandari (2021), Cahyono & Saraswati (2022), dan Febrianti & Febriyanto (2025), ditemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah konservatisme akuntansi. Prinsip konservatisme adalah konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima atau memperoleh bukti yang kredibel. Berdasarkan prinsip konservatisme, jika ada ketidakpastian tentang kerugian, perusahaan harus tetap mencatatnya. Sebaliknya, jika ada ketidakpastian tentang keuntungan, maka tidak harus mencatatnya (Savitri, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Suhana & Kurnia (2021) menunjukkan bahwa secara parsial konservatisme akuntansi memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian Arianata & Handayani (2025) juga menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Akan tetapi, penelitian yang ditunjukkan oleh Maharani & Setyawati (2025), Lestari & Romadhina (2025), dan Masrurroh & Benarda (2025) membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara konservatisme akuntansi dengan agresivitas pajak.

Kebijakan dividen juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Dividen adalah pembagian laba untuk pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Pembagian itu akan mengurangi laba yang tersedia dan ditahan perusahaan. Dividen terbagi menjadi dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dividen utang, dan dividen likuidasi.

Kebijakan dividen adalah keputusan untuk menentukan berapa laba perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali atau ditahan di dalam perusahaan (Lusmeida & Wibowo, 2025). Jika suatu perusahaan memilih untuk mendistribusikan laba yang diperoleh, ini akan mengakibatkan penurunan laba ditahan. Penurunan laba yang ditahan akan mengurangi jumlah total kas yang dimiliki perusahaan. Di sisi lain, apabila sebuah perusahaan memutuskan untuk menyimpan laba, maka kemampuan perusahaan dalam menghimpun kas akan mengalami peningkatan (Lienda dkk., 2023).

Penelitian oleh Lienda dkk. (2023) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Pendapat yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Solikin & Slamet (2022) dan Lusmeida & Wibowo (2025) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Waluyo & Sahara (2025) dan Ryan & Sutandi (2025) menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, terdapat perbedaan pendapat dan hasil yang inkonsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, belum ada penelitian yang secara komprehensif menggabungkan ketiga variabel yaitu Dewan Komisaris Independen, Konservatisme Akuntansi, dan Kebijakan Dividen dalam satu model penelitian untuk menguji pengaruhnya terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *energy*. Merujuk pada

latar belakang dan pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Konservatisme Akuntansi, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak**”

## 2. Metode Penelitian

### 2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan data sekunder. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis data secara objektif, terukur, dan sistematis (Sugiyono, 2019). sedangkan pendekatan asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel (Wibowo, 2021). Dalam penelitian ini, pendekatan asosiatif digunakan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen (X1), konservatisme akuntansi (X2), dan kebijakan dividen (X3) terhadap agresivitas pajak (Y), baik secara parsial maupun simultan.

### 2.2 Operasional Variabel

#### Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan dalam mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak, baik secara legal maupun ilegal. Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio yang menunjukkan besarnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Semakin rendah nilai ETR, terutama di bawah tarif pajak yang berlaku, maka semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan agresivitas pajak (Bernhard & Veny, 2024; Kamul & Riswandari, 2021).

$$\text{Effective Tax Rates (ETR)} = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}} \text{ atau } \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan, namun berperan dalam melakukan pengawasan (Yuliani & Prastiwi, 2021). Keberadaan dewan komisaris independen dapat meminimalisir praktik agresivitas pajak karena sifatnya yang independen (Bernhard & Veny, 2024). Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan berdasarkan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris (Febrianti & Febriyanto, 2025; Cahyono & Saraswati, 2022).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

#### Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dengan tidak mengakui keuntungan sebelum ada bukti yang jelas, sehingga laba dan aset cenderung dilaporkan lebih rendah, sedangkan kewajiban lebih tinggi (Maharani & Setyawati, 2025). Dalam penelitian ini, konservatisme akuntansi diukur menggunakan model Givoly dan Hayn (2000), di mana perusahaan yang konservatif cenderung menghasilkan accrual negatif karena pengakuan beban lebih cepat dan pendapatan ditunda (Savitri, 2016). Nilai konservatisme kemudian disesuaikan dengan mengalikan rasio dengan -1 agar bernilai positif dan mencerminkan tingkat konservatisme yang searah.

$$\text{CONACC} = \frac{\text{NI+DEP-CFO}}{\text{TA}} \times (-1)$$

Keterangan:

CONACC= Konservatisme akuntansi

NI= Net Income  
DEP= Depresiasi  
CFO= Cash Flow dari Aktivitas Operasi  
TA = Total Aset

### Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan dalam menentukan proporsi laba yang dibagikan kepada pemegang saham dan yang ditahan untuk kebutuhan perusahaan (Lienda dkk., 2023). Dalam penelitian ini, kebijakan dividen diprosikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR), yaitu perbandingan antara dividen per saham dengan laba per saham. Semakin tinggi DPR menunjukkan semakin besar laba yang dibagikan kepada pemegang saham (Lusmeida & Wibowo, 2025).

$$\text{Dividen Payout Ratio} = \frac{\text{Dividend Per Share}}{\text{Earning Per Share}}$$

### 2.3 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 dengan data keuangan yang lengkap dan dapat diandalkan.

### 2.4 Sampel

Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 dengan jumlah 91 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan masing-masing perusahaan.

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Pelanggaran Kriteria	Jumlah Kriteria
1.	Perusahaan sektor <i>Energy</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024		91
2.	Perusahaan sektor <i>Energy</i> yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2020-2024	(29)	62
3.	Perusahaan sektor <i>Energy</i> yang laporan keuangannya tidak mengalami kerugian selama periode 2020-2024	(35)	27
4.	Perusahaan sektor <i>Energy</i> yang data laporan keuangannya memenuhi indikator dari setiap variabel penelitian yang dibutuhkan selama periode 2020-2024	(14)	13
<b>Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel</b>			<b>13</b>
<b>Jumlah tahun</b>			<b>5</b>
<b>Jumlah data yang menjadi sampel penelitian</b>			<b>65</b>

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Destriptif

	ETR	DKI	CONACC	DPR
Mean	0.201474	0.402708	0.009746	0.799429
Median	0.220313	0.375000	-0.004798	0.640800
Maximum	0.294372	0.500000	0.405072	4.956789
Minimum	0.068868	0.333333	-0.180482	0.103294
Std. Dev.	0.051483	0.078000	0.103702	0.831524
Skewness	-0.796286	0.402938	1.975366	3.374370
Kurtosis	3.037254	1.269661	8.943002	16.91307
Jarque-Bera	4.229461	6.072518	84.87926	398.5315
Probability	0.120666	0.048014	0.000000	0.000000
Sum	8.058975	16.10833	0.389846	31.97716
Sum Sq. Dev.	0.103369	0.237276	0.419413	26.96588
Observations	40	40	40	40

Sumber : Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil analisis menggunakan statistik deskriptif yang telah disajikan pada tabel 4.5 diketahui bahwa jumlah data yang digunakan pada penelitian ini menjadi 40 data. Jumlah tersebut merupakan jumlah 8 sampel perusahaan *energy* dikalikan 5 tahun pengamatan dari tahun 2020 – 2024. Dari hasil uji statistik deskriptif diatas, diperoleh informasi sebagai berikut:

#### 1. Agresivitas Pajak (Y)

Dari hasil uji statistik diatas Agresivitas Pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0.068868 yang terdapat pada perusahaan yaitu dari PT. Baramulti Suksessarana Tbk. pada tahun 2024, nilai maksimum sebesar 0.294372 yaitu dari Perusahaan PT. Mitrabara Adiperdana Tbk. pada tahun 2023. Nilai rata-rata (mean) pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 - 2024 sebesar 0.201474, serta memiliki nilai simpangan baku atau (standar deviasi) sebesar 0.051483.

#### 2. Dewan Komisaris Independen ( $X_1$ )

Dari hasil uji statistik diatas Dewan Komisaris Independen ( $X_1$ ) memiliki nilai minimum sebesar 0.333333 yang terdapat pada seluruh sampel perusahaan kecuali PT. Baramulti Suksessarana Tbk. pada tahun 2020 - 2024 dan nilai maksimum sebesar 0.500000 yang terdapat pada seluruh sampel perusahaan kecuali PT. AKR Corporindo Tbk. & PT. Baramulti Suksessarana Tbk. pada tahun 2021 - 2024. Nilai rata-rata (mean) pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 - 2024 sebesar 0.402708, serta memiliki nilai simpangan baku atau (standar deviasi) sebesar 0.078000.

#### 3. Konservatisme Akuntansi ( $X_2$ )

Dari hasil uji statistik diatas Konservatisme Akuntansi ( $X_2$ ) memiliki nilai minimum sebesar -0.180482 yang terdapat pada perusahaan PT. Bayan Resources Tbk. pada tahun 2023. Nilai maksimum sebesar 0.405072 pada perusahaan PT. Baramulti Suksessarana Tbk. pada tahun 2023. Nilai rata-rata (mean) pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 - 2024 sebesar 0.009746, serta memiliki nilai simpangan baku atau (standar deviasi) sebesar 0.103702.

#### 4. Kebijakan Dividen ( $X_3$ )

Dari hasil uji statistik diatas Kebijakan Dividen ( $X_3$ ) memiliki nilai minimum sebesar 0.103294 yang terdapat pada perusahaan PT Bukit Asam Tbk. pada tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 4.956789 pada perusahaan PT. Mitrabara Adiperdana Tbk. pada tahun 2024. Nilai rata-rata (mean) pada perusahaan *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 - 2024 sebesar 0.799429, serta memiliki nilai simpangan baku atau (standar deviasi) sebesar 0.831524.

### 3.2 Pemilihan Model Regresi Panel

#### 1. Uji Chow

Tabel 4. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.923164	(7,29)	0.0000
Cross-section Chi-square	42.760306	7	0.0000

Sumber : Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil *Uji Chow* diatas, nilai probabilitas *cross section F* adalah  $0.0000 \leq 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

#### 2. Uji Hausman

Tabel 5. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.630363	3	0.2010

Sumber : Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil *uji hausman* diatas, nilai probabilitas *cross-section* sebesar  $0.2010 \geq 0.05$ , maka  $H_0$  diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

#### 3. Uji Langrange Multiplier

Tabel 6. Uji Langrage Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects  
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	17.76064 (0.0000)	0.126449 (0.7221)	17.88709 (0.0000)
Honda	4.214337 (0.0000)	-0.355596 (0.6389)	2.728542 (0.0032)
King-Wu	4.214337 (0.0000)	-0.355596 (0.6389)	2.257673 (0.0120)
Standardized Honda	5.003978 (0.0000)	-0.106109 (0.5423)	0.432860 (0.3326)
Standardized King-Wu	5.003978 (0.0000)	-0.106109 (0.5423)	-0.043463 (0.5173)
Gourieroux, et al.	--	--	17.76064 (0.0000)

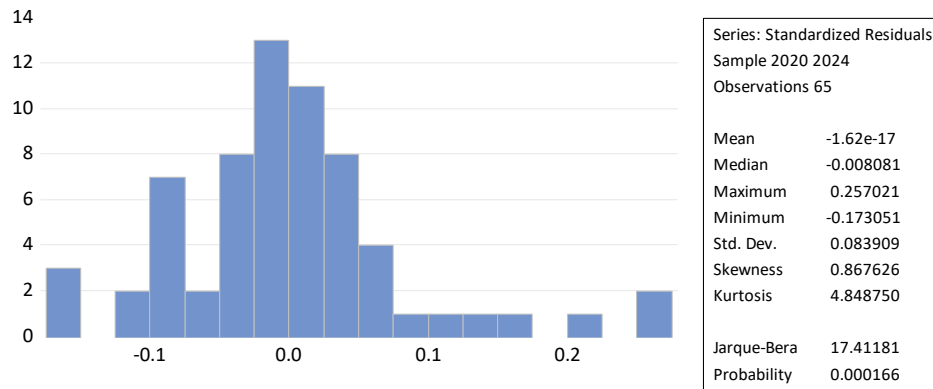
Sumber : Output Eviews 12 (2025)

Hasil pengolahan data diatas, diperoleh nilai probabilitas *Breusch Pagan* adalah sebesar  $0.0000 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak. Artinya, model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model (REM)*.

### 3.3 Uji Asumsi Klasik

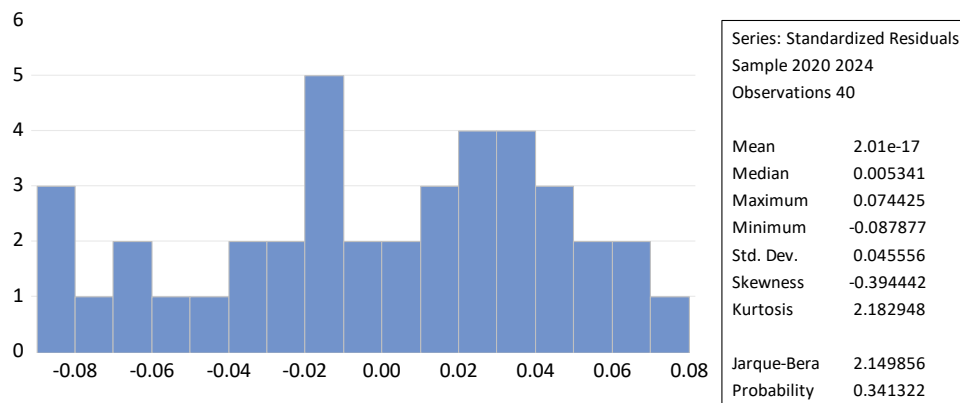
#### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dalam penelitian untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pendeteksian regresi terdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan uji *Jarque-Bera*. Pengambilan Keputusan yaitu jika nilai probability  $> (\alpha = 0.05)$  maka dapat dikatakan residual terdistribusi normal, namun apabila nilai probability  $< (\alpha = 0.05)$  maka dapat dikatakan residual tidak terdistribusi normal. Berikut merupakan hasil uji normalitas dalam penelitian:



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier  
Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar  $0.000166 < 0.05$ , maka dapat dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas merupakan syarat dari analisis regresi data panel, maka dilakukan reduksi outlier dan dengan harapan data dapat berdistribusi normal. Setelah dilakukan reduksi outlier, jumlah sampel awal yaitu 65 sampel menjadi 40 sampel. Hasil data setelah dilakukan outlier ditunjukkan oleh tabel 4.2 sebagai berikut.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier  
Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Diketahui pada gambar diatas, hasil uji normalitas kedua didapatkan nilai *Jarque-Bera* 2.149856 dengan nilai probability  $0.341322 > (\alpha = 0.05)$  maka dapat dikatakan residual berdistribusi normal dan model regresi dapat digunakan sebagai pengujian berikutnya.

### Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.001567	29.97035	NA
DKI	0.009931	31.92217	1.126428
CONACC	0.005273	1.066744	1.057167
DPR	8.42E-05	2.114287	1.085367

Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai centered VIF dari variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  memiliki nilai yang lebih kecil dari 10, yaitu variabel  $X_1$  ( $1.126428 < 10$ ), variabel  $X_2$  ( $1.057167 < 10$ ), dan variabel  $X_3$  ( $1.085367 < 10$ ), hal ini menandakan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.022981	0.016839	1.364752	0.1828
DKI	-0.003339	0.042930	-0.077768	0.9385
CONACC	0.001619	0.029832	0.054274	0.9571
DPR	-0.001441	0.003701	-0.389352	0.6999

Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji Glejser menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai probabilitas diatas 0.05, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pada model *Random Effect* estimasi yang digunakan adalah *Generalized Least Squares* (GLS) sehingga struktur error telah dimodelkan dalam estimasi. Oleh karena itu, uji Durbin-Watson untuk mendeteksi adanya autokorelasi tidak menjadi acuan utama dalam panel data (Napitupulu dkk., 2021).

### 3.4 Analisis Regresi berganda

Tabel 9. Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.207538	0.032714	6.343948	0.0000
DKI	-0.016238	0.077574	-0.209326	0.8354
CONACC	-0.244288	0.054373	-4.492862	0.0001
DPR	0.003574	0.006770	0.527890	0.6008

Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Persamaan yang digunakan adalah  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$ , lalu angka-angka dalam tabel disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut hingga menjadi:

$$ETR = 0.207538 - 0.016238DKI - 0.244288CONACC + 0.003574DPR + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta memiliki nilai positif sebesar 0.207538. Tanda positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan jika dewan komisaris independen, konservatisme akuntansi dan kebijakan dividen nilainya adalah 0 atau tidak mengalami perubahan, maka besarnya agresivitas pajak nilainya sebesar 0. 207538.
2. Nilai koefisien regresi variabel dewan komisaris independen sebesar -0.016238 artinya jika dewan komisaris independen mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, sehingga akan menurunkan nilai agresivitas pajak sebesar 0.016238 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya sama (konstan). Tanda negatif menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara variabel dewan komisaris independen dengan variabel agresivitas pajak. Sehingga, jika nilai dewan komisaris independen meningkat, maka agresivitas pajak akan menurun.
3. Nilai koefisien regresi variabel konservatisme akuntansi sebesar -0.244288 artinya jika konservatisme akuntansi mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka nilai agresivitas pajak akan menurun sebesar 0. 244288 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya sama (konstan). Tanda negatif menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara variabel konservatisme akuntansi dengan variabel agresivitas pajak. Sehingga, jika nilai konservatisme akuntansi meningkat, maka agresivitas pajak akan menurun.
4. Nilai koefisien regresi variabel kebijakan dividen sebesar 0.003574 artinya jika kebijakan dividen mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, sehingga akan meningkatkan nilai agresivitas pajak sebesar 0.003574 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya sama (konstan). Tanda positif menunjukkan hubungan berbanding lurus antara variabel kebijakan dividen dengan variabel agresivitas pajak. Jika nilai kebijakan dividen menurun, maka agresivitas pajak menurun.

### 3.5. Koefisien Determinasi

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.352838	Mean dependent var	0.074455
Adjusted R-squared	0.298908	S.D. dependent var	0.036460
S.E. of regression	0.030528	Sum squared resid	0.033551
F-statistic	6.542498	Durbin-Watson stat	1.401268
Prob(F-statistic)	0.001204		

Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.298908 atau 29,89% dari variabel dependen yaitu agresivitas pajak yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu dewan komisaris independen, konservatisme akuntansi, dan kebijakan dividen. Sedangkan sisanya yaitu 70,11% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian.

### 3.5 Pengujian Hipotesis

#### Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 11. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

R-squared	0.352838	Mean dependent var	0.074455
Adjusted R-squared	0.298908	S.D. dependent var	0.036460
S.E. of regression	0.030528	Sum squared resid	0.033551
F-statistic	6.542498	Durbin-Watson stat	1.401268
Prob(F-statistic)	0.001204		

Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel 4.17 hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai F-statistic diperoleh 6.542498 dengan nilai probabilitas 0.001204. Sedangkan untuk mencari F-tabel dengan jumlah sampel ( $n$ ) = 40, dengan jumlah variabel ( $k$ ) = 3 dan taraf signifikan = 0.05 maka  $df_1 = k-1 = 3-1 = 2$  dan  $df_2 = n-k = 40-3 = 37$  diperoleh nilai F-tabel sebesar 3.25 sehingga F-statistic 6.542498 > 3.35 dengan nilai probabilitas 0.001204 < 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa  $H_1$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen, konservatisme

akuntansi dan kebijakan dividen secara simultan dan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2024.

### Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T)

Tabel 12. Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.207538	0.032714	6.343948	0.0000
DKI	-0.016238	0.077574	-0.209326	0.8354
CONACC	-0.244288	0.054373	-4.492862	0.0001
DPR	0.003574	0.006770	0.527890	0.6008

Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Perhitungan t-Tabel:  $df = n - k$  yaitu:  $40 - 3 = 37 = 1.68709$ , berdasarkan hasil pada tabel 4.18, hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji t pada variabel dewan komisaris independen mempunyai nilai probabilitas  $0.8354 > 0.05$  dan nilai t-Statistic  $0.209326 < 1.68709$  artinya variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H<sub>2</sub> ditolak**.
2. Uji t pada variabel konservatisme akuntansi mempunyai nilai probabilitas  $0.0001 < 0.05$  dan nilai t-Statistic  $4.492862 > 1.68709$  artinya variabel konseratisme akuntansi berpengaruh signifikan secara negatif terhadap agresivitas pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H<sub>3</sub> diterima**.
3. Uji t pada variabel kebijakan dividen mempunyai nilai probabilitas  $0.6008 > 0.05$  dan nilai t-Statistic  $0.528890 < 1.68709$  artinya variabel kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H<sub>4</sub> ditolak**.

### 3.6 Pembahasan

#### Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Konservatisme Akuntansi, dan Kebijakan Dividen terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.19 dapat diketahui bahwa variabel dewan komisaris independen, konservatisme akuntansi, dan kebijakan dividen mempunyai nilai probabilitas sebesar  $0.001204 < 0.05$  dan nilai F-statistic  $6.542498 > 3.35$  artinya H<sub>1</sub> diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen, konservatisme akuntansi, dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 – 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel independen atau bebas dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Hasil pengujian ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dengan pemerintah sebagai prinsipal dalam pemungutan pajak, serta dengan pemegang saham dalam pengelolaan laba dan pembagian dividen. Manajemen memiliki insentif untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan kinerja perusahaan, salah satunya melalui upaya meminimalkan beban pajak. Oleh karenanya, kebijakan akuntansi yang diterapkan, mekanisme pengawasan melalui dewan komisaris, serta keputusan pembagian laba kepada pemegang saham secara simultan membentuk strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Hasil uji simultan ini menegaskan bahwa agresivitas pajak merupakan fenomena yang kompleks dan perlu dikendalikan dengan beberapa pendekatan yang komprehensif.

#### Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Pengujian H<sub>2</sub> menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari hasil uji parsial, koefisien regresi dewan komisaris independen memiliki nilai t-Statistic  $0.209326$  dan lebih kecil dari t tabel sebesar  $1.68709$  dan tingkat probabilitas sebesar  $0.8354$  lebih besar dari  $0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan H<sub>2</sub> ditolak.

Secara teori, dewan komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik keagenan dan memastikan bahwa kebijakan Perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan, dijalankan secara transparan dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta ketentuan yang berlaku. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan kewenangan komisaris independen dalam pengambilan keputusan operasional, kurangnya pemahaman mengenai strategi perpajakan perusahaan, serta kemungkinan bahwa keberadaan komisaris independen hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan regulasi tata kelola perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyono & Saraswati (2022), Yuliani & Prastiwi (2021), serta Febrianti & Febriyanto (2025), yang menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian - penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran komisaris independen sering kali bersifat formalitas untuk memenuhi ketentuan good corporate governance, sehingga belum mampu memberikan pengawasan substantif terhadap kebijakan pajak perusahaan.

### **Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Agresivitas Pajak**

Pengujian H<sub>3</sub> menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan dengan arah yang negatif terhadap agresivitas pajak. Dari hasil uji parsial, koefisien regresi konservatisme akuntansi memiliki nilai t-Statistic 4.492862 dan lebih besar dari t tabel sebesar 1.68709 dan tingkat probabilitas sebesar 0.0001 lebih kecil dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan secara negatif terhadap agresivitas pajak dan H<sub>3</sub> diterima. Artinya, semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansi akan menurunkan tindakan agresivitas pajak pada perusahaan.

Konservatisme akuntansi membatasi ruang manajemen dalam melakukan manipulasi laba dan perencanaan pajak agresif, karena pengakuan pendapatan dilakukan secara lebih hati-hati dan beban diakui lebih cepat. Hal ini meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan sehingga mengurangi peluang manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhana & Kurnia (2021), serta Arianata & Handayani (2025), yang menemukan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi yang konservatif bukan dengan tujuan untuk melakukan menghindari pajak secara agresif, melainkan untuk kewaspadaan atau kehati-hatian dalam menghadapi risiko ada masa depan yang tidak dapat diprediksi (Suhana & Kurnia, 2021).

Dalam perspektif teori agensi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Dengan prinsip konservatisme, manajemen terdorong untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih andal dan tidak terlalu optimis, sehingga konservatisme akuntansi dapat dipandang sebagai faktor dalam menekan tingkat agresivitas pajak perusahaan, khususnya pada perusahaan sektor energi yang memiliki kompleksitas operasional dan risiko fiskal yang tinggi.

### **Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Agresivitas Pajak**

Pengujian H<sub>4</sub> menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari hasil uji parsial, koefisien regresi kebijakan dividen memiliki nilai t-Statistic 0.527890 dan lebih kecil dari t tabel sebesar 1.68709 dan tingkat probabilitas sebesar 0.6008 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan H<sub>4</sub> ditolak.

Kebijakan dividen pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan, kebutuhan pendanaan internal, stabilitas arus kas, serta ekspektasi pemegang saham terhadap tingkat pengembalian investasi. Pada sektor energi, dibutuhkan investasi modal besar dan berjangka panjang sehingga perusahaan cenderung berhati-hati dalam menetapkan kebijakan dividen. Dalam teori agensi, dividen berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham melalui distribusi laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak berkaitan langsung dengan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Waluyo & Sahara (2025), serta Ryan & Sutandi (2025), yang menemukan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas

pajak. Hal ini dikarenakan kebijakan dividen lebih didasarkan pada reputasi dan kesinambungan usaha dibandingkan dengan pertimbangan penghematan pajak

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen, konservatisme akuntansi, dan kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak. Sampel penelitian terdiri atas 6 perusahaan yang diamati selama periode 2020 – 2024, dengan kriteria perusahaan yang secara konsisten memperoleh laba selama periode penelitian. Pengolahan dan pengujian data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak *EViews 12*. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen dan kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel konservatisme akuntansi terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Secara simultan, variabel dewan komisaris independen, konservatisme akuntansi, dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adapun analisis lebih lanjut mengenai masing-masing variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 1). Dewan komisaris independen, konservatisme akuntansi, dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 – 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak merupakan fenomena yang kompleks dan perlu dikendalikan dengan beberapa pendekatan lainnya yang komprehensif. 2). Dewan komisaris independen terbukti tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena kehadiran dan peran komisaris independen sering kali hanya menjadi formalitas untuk memenuhi ketentuan *good corporate governance*, sehingga belum mampu memberikan pengawasan terhadap kebijakan pajak perusahaan. 3). Konservatisme akuntansi terbukti memiliki pengaruh signifikan secara negatif terhadap agresivitas pajak. Konservatisme akuntansi mendorong manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih andal dan tidak terlalu optimis, sehingga dapat menjadi faktor untuk menekan tingkat agresivitas pajak perusahaan. 4). Kebijakan dividen terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan karena kebijakan dividen lebih didasarkan pada reputasi dan kesinambungan usaha dibandingkan dengan pertimbangan penghematan pajak.

#### Referensi

1. Arianata, F., & Handayani, P. (2025). Pengaruh Financial Distress, Konservatisme Akuntansi, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance Menggunakan Metode Kuantitatif. *Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.30812/rekan.v6i1.4908>
2. Bernhard, C. T., & Veny. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Rasio Keuangan Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 163–185. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.219>
3. Cahyono, Y. T., & Saraswati, R. (2022). Pengaruh Efektivitas Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properties, Real Estate, dan Infrastructures Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13647–13657. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4489>
4. Febrianti, G., & Febriyanto, F. C. (2025). Pengaruh Leverage, Dewan Komisaris Independen dan Intesitas Modal terhadap Agresivitas Pajak. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 3604–3609. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2382>
5. Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
6. Ghozali, I., & Ratmono, D. (2020). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
7. Halim, S. (2024). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022*. 3(1), 1–12. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/view/2887>
8. Kamul, I., & Riswandari, E. (2021). Pengaruh Gender Diversity Dewan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 218–238. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p218-238>
9. Lestari, F., & Romadhina, A. P. (2025). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Derivatif Keuangan, Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Publik Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 9(2), 82–92. <https://doi.org/10.33884/jab.v9i2.9884>
10. Lienda, E., Indriani, J., Richie, Wahyuningsih, & Oktafia, W. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Industrial yang terdaftar di BEI 2020-2022). *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)*, 4(1), 218–237. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PIM/article/view/41022>
11. Lusmeida, H., & Wibowo, P. C. (2025). The Influence of Dividen Policy, Sales Growth, and Audit Quality on Tax Aggressiveness with the Audit Committee as a Moderation. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 9(2), 225–239. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2025.v9.i2.7163>
12. Maharani, S., & Setyawati, W. (2025). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Inventory Intensity Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 4(1), 54–63. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i1.6807>
13. Masrurroh, S., & Benarda. (2025). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance dan Financial Distress terhadap Agresivitas Pajak. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 3(3), 105–122. <https://doi.org/10.61132/aepgp.v2i3.1437>
14. Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harijanja, H., Sirait, R. T. ., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa Data dengan SPSS - STATA - EViews* (1st ed.). Madenatera.
15. Ryan, A. J., & Sutandi. (2025). Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Kebijakan Deviden terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2023. *NIKAMABI*, 4(1). <https://doi.org/10.31253/ni.v4i1.3694>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7789>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

16. Savitri, E. (2016). *Konservatisme Akuntansi* (Musfialdi (ed.); 1st ed.). Pustaka Sahila Yogyakarta.
17. Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 270–283. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521>
18. Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
19. Suhana, D. F., & Kurnia. (2021). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Derivatif Keuangan, Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Publik Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Politeknik Caltex Riau*, 14(2), 310–319. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i2.5122>
20. Wahyuningtias, T., Athariq, S. P., Nurkhasanah, K. I., Wahdini, S. A. N., Janah, R. S. R., & Fasya, Y. A. (2025). Analisis penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan multinasional (studi kasus PT Adaro Energy tbk). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 7(1), 28–35. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15020>
21. Waluyo, A. S., & Sahara, L. I. (2025). Pengaruh Intensitas Modal, Struktur Kepemilikan Manjemrial, Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 756–765. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1270>
22. Wibowo, A. E. (2021). Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah. In A. Kurniawan, L. Forsia, & H. Nuraini (Eds.), *Insania*. Insania.
23. Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institutional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141–148. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>